PANDANGAN TERHADAP WAKAF YANG DIAMBILALIH NAZHIRNYA (Studi Kasus Masyarakat Lamaru RT. 17)

Herianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
muslimhid@gmail.com

Muhammad Naufal

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
m.naufal90@gmail.com

Jumaidil Ilham

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
jumaidil1996@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengambilalihan amanah nazhir wakaf di RT. 17 kelurahan Lamaru oleh sekelompok masyarakat. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim, dengan alasan permasalahan khilafiah. Sementara nazhir tersebut amanah terhadap wakaf yang dia kelola. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus, Subyek penelitian ini adalah masyarakat Lamaru RT. 17 Kecamatan Balikpapan Timur. Obyek penelitian ini adalah persepsi masyarakat Lamaru terhadap wakaf yang diambilalih nazhirnya. Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan masyarakat Lamaru terbagi menjadi dua kelompok dalam memahami permasalahan tersebut. Pertama, masyarakat Lamaru yang berpendapat bahwa pengambilalihan fungsi nazhir ini adalah tindakan yang menzalimi nazhir pertama yang tidak sesuai dengan tuntunan *al-Qur'an* dan *sunnah*. Kedua, masyarakat Lamaru yang berpendapat bahwa pengambilalihan nazhir oleh sebagian masyarakat Lamaru adalah tindakan yang sangat bijaksana demi mempertahankan kebiasaan.

Kata Kunci : *mejemenen wakaf, nazhir, wakaf masjid*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Wakaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *hablum minallah wa hablum minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹

Kedudukan wakaf sebagai ibadah juga sebagai tabungan si *wakif* (orang yang

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), 490.

berwakaf) untuk bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tiada putus-putusnya, walaupun si *wakif* telah meninggal dunia. Rasulullah bersabda:

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□ :□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□

“Jika telah meninggal dunia, maka amal perbuatannya telah terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang selalu mendo’akannya”. (HR. Muslim, No. 1631)²

Dari hadits di atas, jelaslah bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.³

Perwakafan adalah serangkaian ibadah yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat atau memiliki pahala jariyah bagi wakif sebagai bekal bagi kehidupan tak terbatas.⁴ Wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an. Namun secara umum, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan rujukan untuk melaksanakan wakaf. Sebagaimana penegasan al-Qur’an Surat al-Imran ayat 92:

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□
 (٩٢) □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

²Imam, Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim Juz 2*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab ‘Alamiyah, n.d), 14.
³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 40 (Bandung : Sinar Baru, 2007), 341.
⁴ Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam*, Juz III, (Surabaya : Al- Ikhlas),311.

Dipandang dari hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali, ada orang yang berwakaf, ada benda yang diwakafkan, serta ada orang yang menerima wakaf (*nazhir*) dalam bentuk akad. Dan akhir-akhir ini mulai muncul pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan atau menghilangkan fungsi harta wakaf menjadi milik pribadi. Seperti yang terjadi Kel Lamaru, Balikpapan Timur.

Berikut uraian kronologis pengambilalihannya. Setelah bapak KH meninggal dunia Ibu NF ingin mewakafkan tanahnya untuk di bangun Mushalla yang kemudian diadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami sehingga tanah yang dia wakafkan bermanfaat bagi masyarakat umum dan terlebih lagi bagi *muwakif*. Namun dia merasa bahwa apa yang dia nazarkan tidak mungkin dia bisa lakukan dengan keadaannya sekarang, sehingga dia memberi pesan kepada anaknya untuk melanjutkan apa yang dia nazarkan bahwa dia ingin mewakafkan tanahnya untuk dibangun Mushalla.

Setelah Ibu NF meninggal dunia anaknya menunaikan apa yang ibunya nazarkan untuk mewakafkan tanahnya, sehingga anaknya mewakafkan tanah tersebut kepada bapak NS untuk di bangun Mushalla sesuai keinginan ibunya. Dalam mengelola tanah wakaf tersebut bapak NS tidak melakukan apa-apa untuk menjadikan tanah wakaf tersebut menjadi bermanfaat bagi masyarakat umum karena dia tidak bisa dalam mengurus tanah wanah wakaf tersebut sehingga apa yang ingin dicapai dari tanah wakaf tersebut tidak ada. Melihat hal tersebut keluarga Ibu NF merasa bahwa tanah wakaf tersebut tidak akan bermanfaat selama dikelola oleh bapak NS, oleh karena itu pihak keluarga menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada masyarakat umum untuk bermusyawarah mencari nashir yang bisa mengelola tanah wakaf tersebut dan menjadikannya bermanfaat bagi masyarakat umum. Melihat hal tersebut masyarakat umum melakukan musyawarah untuk menentukan orang yang mampu mengelola tanah wakaf tersebut, dari hasil musyawarah tersebut ditunjuklah bapak WY sebagai nazhirnya.

Setelah bapak WY ditunjuk sebagai nazhir dia bersama masyarakat umum melakukan kerja gotong royong setiap hari ahad dalam proses pembangunan Mushalla, akhirnya Mushalla tersebut jadi dalam jangka waktu dua bulan. Setelah Mushalla itu jadi bapak WY mengadakan kegiatan di Mushalla tersebut seperti: pengajian, TK/TPA dan lain sebagainya, akan tetapi setelah itu semua terlaksana ada kelompok tertentu tidak suka dengan apa yang bapak WY lakukan karena mereka

merasa bahwa apayang dilakukan oleh bapak WY tidak menguntungkan bagi mereka dan bertolak belakang dengan apa yang mereka inginkan. Berawal dari sinilah mereka merasa bahwa kalau kita tidak mengambilalih amanah nazhir dalam mengelola tanah wakaf tersebut itu akan berbahaya bagi masa depan keturunana mereka.

Nazhir wakaf adalah orang atau lembaga yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.⁵ Dalam pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan bahwa *nazhir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf.⁶ Di dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁷ Untuk membantu dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maka di keluarkanlah PP Nomor 42 Tahun 2006 yang berguna untuk membantu dalam hal pelaksanaan dan mengaplikasikannya kepada masyarakat.

Kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nazhir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf tergantung dari *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Darul Ulum Press, 1999), 33.

⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1075 Serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : n.p, 2004), 213.

⁷ Edisi Lengkap Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 Tentang Perwakafan, (Surabaya : Kesindo Utama, 2010), 161.

bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.⁸Jika kita mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pada pasal 11 pada dasarnya akan ditemukan beberapa tugas atau kewajiban yang dibebankan pada *nazhir* wakaf. Tugas atau kewajiban itu antara lain :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Badan Wakaf Indonesia mengingat salah satu tujuan wakaf sebagai bentuk ibadah untuk memajukan kesejahteraan umum yang dikelola secara produktif oleh *nazhir*, tentu memerlukan *nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara professional dan bertanggung jawab. Apabila *nazhir* tidak mampu melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka si wakif wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi *nazhir* sepanjang ia bisa melakukan tugasnya berdasarkan hukum yang ditentukan. Tapi, karena tugas *nazhir* menyangkut harta benda yang manfaatnya untuk kepentingan umum, maka tugas *nazhir* harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu.⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat Lamaru terhadap wakaf yang di ambilalih Nazhirnya.

B. Wakaf

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah *ijtimaiyyah*).¹⁰ Secara bahasa kata wakaf berasal dari bahasa arab, *al-waqfu* bentuk *masdhar* dari susunan *fi'il* (kata kerja) kata *al-waqfu* semakna dengan kata *al-habs* yang berasal dari bentuk *masdhar* dari susunan *fi'il* yang keduanya mempunyai

⁸ Depak RI, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia* (Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2006), 51.

⁹*Ibid.*,52.

¹⁰ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003). 1

arti yang sama yakni menahan.¹¹

Secara istilah, banyak ahli atau pakar fiqh yang mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa wakaf adalah;

□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

“Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.”¹²

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan untuk umum atau khusus.¹³ Sejalan dengan itu Maulana Muhammad Ali merumuskan wakaf sebagai penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.¹⁴

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹⁵ Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.¹⁶ Sedangkan menurut Al-San’any, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁷

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

- a. UU wakaf yang terbaru yaitu UU No. 41 tahun 2004

Disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk

¹¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-'Ishri*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2000). 733

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al-Turus, n.d). 378 Juz 3

¹³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2000). 52

¹⁴ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, (Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1976). 467

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazhabi al-Khamsah*, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Fikih Lima Mazhab”, (Jakarta : Lentera 2001). 635

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta : Prenada Media, 2003). 223

¹⁷ Al-San’any, *Subul al-Salam*, Juz III (Kairo : Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950). 87

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'at.¹⁸

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 215 butir 1 (INPRES No. 1/1991)

Disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syari'at.¹⁹

Dari beberapa pengertian wakaf diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa wakaf adalah harta yang ditahan asalnya dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum, dan harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan dan tidak diperjualbelikan.

¹⁸ UU No. 41 Tahun 2004

¹⁹ Tim Redaksi focus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2005). 68

Wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an namun demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Misalnya firman Allah :

1. Q.S al-Baqaroh ayat 267

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□
 □□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
 (٢٦٧) □□□□□□□ □□□□□□□

2. Q.S al-Imron ayat 92

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□
 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□
 (٩٢) □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli fiqh dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.²⁰ Itulah sebabnya Buya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan surah al-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi saw dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.²¹

3. Q.S al-Hajj ayat 77

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 (٧٧) □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988). 81

²¹ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz IV, (Jakarta : PT Pustaka Panji Mas, 1999). 8

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukan shodaqoh yang mempunyai hukum sunnah, seperti sedekah hibah, wakaf, serta shodaqoh lainnya.²²

Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela untuk mendermakan sebagian kekayaan. Maka wakaf ini bernilai jariyah, artinya pahala wakaf akan senantiasa diterima secara berkesinambungan sepanjang manfaat harta yang di wakafkan itu masih dapat diambil untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum, meskipun si pelaku wakaf (wakif) sudah meninggal dunia.²³

Selain dalam al-Qur'an di dalam beberapa hadits juga dijelaskan tentang shodaqoh secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf.

Di antaranya Sabda Nabi saw :

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□ :□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□

“Jika telah meninggal dunia, maka amal perbuatannya telah terputus: kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang selalu mendo'akannya”. (HR. Muslim, no. 1631)²⁴

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus, sepanjang manfaat harta yang di wakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah.

Selain itu juga Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lebih sharih menjelaskan tentang wakaf namun menggunakan kata habsu :

□□□□□□□ : □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□

²² Lihat penjelasan kata *yunfiqun* , dalam Al- Razi, *Ahkam al-Qur'an*, (Kairo : Dar-Mushaf, n.d). 300

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 483

²⁴ Imam, Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim Juz2*, (Beirut Lebanon : Dar al-Kitab 'A'lamiyah, n.d), 14

manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh pahala dari Allah. Kepentingan tersebut bisa berupa kepentingan sosial maupun keagamaan.

Untuk memperjelas syarat dan rukun wakaf maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun dilakukan. Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat wakaf adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁶ melazimkan sesuatu.²⁷

Secara terminologi, yang di maksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁸ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁹ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan sesuatu hukum tersebut. Yang di maksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat tergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti adanya hukum.³⁰ Sedangkan rukun terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³¹

Adapun rukun wakaf dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.³² Jadi wakif tidak hanya perorangan tetapi juga bisa dalam bentuk organisasi dan badan hukum.³³

Wakif atau orang yang mewakafkan amalan wakaf pada hakikatnya

²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005). 64

²⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1995). 34

²⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004). 50

²⁹ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978). 118.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Cairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958). 59

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2006). 25

³² Pasal 215 (2) KHI dan Pasal 1 (2) PP No. 28 Tahun 1977.

³³ Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004

adalah tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*.³⁴ Mengenai kecakapan bertindak, dalam hukum fikih ada dua istilah yang perlu dipahami untuk membedakannya, yakni *baligh* dan *rasyid*. Pengertian *baligh* menitikberatkan pada usia, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat 15 tahun. Adapun yang dimaksud dengan *rasyid* adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak. Oleh karena itu, menurut Jumhur Ulama tidak ada wakaf yang bisa dilakukan oleh orang bodoh atau pailit (bangkrut).³⁵

Adapun syarat-syarat yang dikemukakan pada pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 di kemukakan dalam pasal wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dewasa.³⁶
- b. Berakal.
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,³⁷ dan
- d. Wakif pemilik sah harta benda wakaf.³⁸

Sedangkan bagi wakif yang berasal dari organisasi sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila ketentuan organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Kemudian bagi wakif yang berasal dari badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam kaitannya ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim, oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.

³⁴ Muhammad Rawas Qal'ah Jay, *Mausu'ah Fiqh Umar Ibn Al-Khatab*, (Beiru Lebanon : Dar Al Nafas, 1989).

³⁵ Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004). 136

³⁶ Abi Yahya Zakariyah al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz 1, (Beirut Lebanon : Dar al-Fikr, n.d). 256

³⁷ Maksud dari tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum adalah sudah memenuhi kriteria selain baligh dan berakal sehat juga harus rasyid sebagaimana yang dijelaskan Fuqaha serta Said Agil al-Munawar dalam bukunya *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. h. 136. Dengan demikian segala perbuatan dari wakif dapat di pertanggungjawabkan di depan hukum.

³⁸ Ahmad Rofiq *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1997). 493

Selain itu wakif yang *tabarru'* dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya *qabul* (ucapan terima) dari orang yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.³⁹

Sebagai ibadah yang *tabarru'*, wakaf memang tidak mengharuskan adanya *qabul*. Meskipun demikian, ini harus dipahami dan jangan sampai dalam penafsiran dalam pelaksanaannya, wakaf perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat muamalah dalam QS. Al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan wakaf.⁴⁰

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003). 493
⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004),

memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat dari benda wakaf yang akan di wakafkan adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut.
- b. Benda wakaf berupa milik pribadi, kelompok atau badan hukum.
- c. Hak milik wakif harus jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- d. Harta yang di wakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batasan-batasannya (misalnya tanah).⁴²
- e. Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar.
- f. Harta yang di wakafkan itu dapat berupa benda yang bergerak dan yang tidak bergerak.
- g. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.
- h. Benda wakaf bukan benda haram atau najis.⁴³

Pada awalnya permulaan wakaf di syari'atkan yakni pada zaman Rasulullah saw. Sedangkan sifat dari harta wakaf ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun. Tetapi dalam perkembangannya banyak pula yang mewakafkan harta yang bergerak seperti yang dikemukakan dalam pasal 215 ayat 4 dari UU No. 41 Tahun 2004, "*benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam*".

Adapun benda yang tidak bergerak seperti yang tertera pada UU No. 41 Tahun 2004 pada pasal 16 ayat 2 adalah:

- 1) Adalah tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bangunan atau bagian dari bangunan.
- 3) Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

⁴² Said Agil Husin Al Munawar, h. 136-139

⁴³ Muhammad Rawas Qal'ah, h. 877

4) Hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik.

Adapun benda yang bergerak meliputi:

- a) Uang
- b) Logam mulia
- c) Surat berharga
- d) Kendaraan
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Hak sewa
- g) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan syarat benda-benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat 3).

3. Tujuan Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf seharusnya wakif menentukan tujuan dalam mewakafkan harta benda miliknya, seperti harta wakaf tersebut digunakan untuk masjid, pondok pesantren atau yang lainnya. Dalam wakaf yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan untuk kebaikan mencari ridha Allah swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberi wakaf untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung yang memungkinkan digunakan untuk tujuan maksiat. Untuk lebih konkritnya tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mencari keridhaan Allah swt, termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti: mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam, dan sebagainya. Karena itu seorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain, membantu pendidikan selain agama Islam dan lain-lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk industri minuman keras, ternak babi dan sebagainya.

- b. Untuk kepentingan masyarakat, seperti: membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim piatu dan sebagainya.⁴⁴
- c. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang mubah menurut kaidah hukum Islam.⁴⁵

4. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁴⁶ Dalam *sighat* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, dan disebutkan dengan jelas benda yang di wakafkan, kepada siapa di wakafkan dan untuk apa di wakafkan.⁴⁷ *Sighat* tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat yang semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif tersebut, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, maka tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.⁴⁸

Mengenai masalah saksi dalam ikrar wakaf, tidak dibicarakan dalam kitab-kitab Fiqh Islam, karena mungkin para ahli Fiqh menggolongkan wakaf ke dalam tindakan *tabarru'* yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu imbalan. Pelepasan hak itu ditunjukkan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah ini termasuk kedalam kategori *masalah mursalah* yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan. Juga pernyataan wakif harus jelas yakni :

- a. Melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang di wakafkan.
- b. Menentukan benda wakaf itu diperuntukkan untuk apa, apakah khusus untuk kepentingan masyarakat.⁴⁹

Dalam pasal 5 PP No. 28 Tahun 1977. Pasal 218 KHI. Pasal 17 UU No. 41

⁴⁴ Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Ditjen Bimbingan Islam, 1986). 216

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988). 87

⁴⁶ KHI Pasal 215 (3), Pasal 1 ayat (3) PP. No. 28 Tahun 1977

⁴⁷ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). 31

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 216

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, h. 88

Tahun 2004.

- 1) Pihak yang mewakafkan hartanya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas Kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- 2) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 10 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

5. Nazhir (orang yang memelihara benda wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah tabarru'. Namun demikian, dengan perkembangan zaman serta memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran nazhirnya sangat penting. Sub ini kami akan bahas di pembahasan berikutnya.

Sejalan dengan tujuannya, wakaf terbagi menjadi dua bagian yaitu: *wakaf ahli* dan *wakaf khairi*.⁵⁰

1. Wakaf Ahli

Wakaf yang ditunjukkan untuk anak cucu dan kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditunjukkan untuk orang-orang fakir. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri.⁵¹

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditinjau dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf ahli/dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturrahimnya.⁵²

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas Bin

⁵⁰ Asyumi A. Rahman dkk, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Depag, 1986). 220

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Beirut : Dar al-Fikr, n.d). 307

⁵² Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : PT Garoeda Buana, 1992). 3

Malik, tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□...
 □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□,
 □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□

“... aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”

Wakaf ahli banyak dipraktekkan di Negara Timur Tengah seperti Mesir, Syiria, namun mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara ataupun disebabkan munculnya persoalan yang timbul karenanya.⁵³

Banyak diantara mereka yang menyalagunakannya. Misalnya:

- a. Menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia.
- b. Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas hutang-hutangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah kekayaannya.⁵⁴

Oleh karena itu, di beberapa Negara tersebut. Wakaf ahli ini dibatasi dan bahkan dihapuskan seperti halnya di mesir telah menghapuskan wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No. 180 Tahun 1952. Sedangkan di Syiria telah menghapus praktek wakaf ahli ini pada tahun sebelumnya.⁵⁵

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf yang di peruntukkan kebaikan semata-mata.⁵⁶ Dengan kata lain wakaf khairi merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau

⁵³ Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam di Jakarta, *Ilmu Ushul*, Jilid 3, (Jakarta: Depak, 1986). 221

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 492

⁵⁵ *Ibid*, h.492

⁵⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 3, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995). 200

kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf khairi, si wakif dapat juga mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan.⁵⁷ seperti wakaf masjid maka si wakif boleh shalat di sana, atau mewakafkan sumur maka si wakif boleh saja ambil air dari sumur tersebut.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan di anjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukan guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih diambil manfaatnya. Bentuk-bentuk diatas, wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat menikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan.⁵⁸

Wakaf memiliki manfaat yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebahagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lain, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belah kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.⁵⁹

⁵⁷ Faisal Haq dan Saiful Anam, *op. cit.* h. 6-7

⁵⁸ Muhammad Daut Ali, *op. cit.* h.91-92

⁵⁹ Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr, 1980). 131

Alqur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebaikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan memanfaatkan harta untuk kebaikan, juga mencakup kebaikan melalui wakaf.⁶⁰ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal dzatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.⁶¹ Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain :

1. Harta benda yang di wakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
2. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan ummat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan ummat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.⁶²

Mengingat besar manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat sampai sekarang.⁶³

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi wakif maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan sumber dan potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat,

⁶⁰ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002). 103

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002). 240

⁶² Masfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 3, (Jakarta : Rajawali, 1988). 77-79

⁶³ Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 308

seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁶⁴

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafal atau sighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Kepemilikan yang semula dari wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafal, walaupun barang itu masih berada di tanagn wakif. Menurut beberapa pendapat Imam Madzhab bahwa perwakafan tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya saja Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan atau mengumumkan barang wakaf tersebut.⁶⁵

Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam pasal 10 ayat 1-5 PP No. 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977, KHI pasal 223, maka pelaksanaan wakaf itu sebagai berikut:

Yakni wakif menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tanah yang akan di wakafkan itu berada, dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua saksi. Setelah selesai Ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama nazhir diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah, Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No, 10 Tahun 1961. Selanjutnya kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya. Tapi kalau tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. Setelah nazhir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat tersebut seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA.⁶⁶

Dalam melaksanakan ikrar wakaf harus disertai dengan surat-surat sebagai berikut:

1. Tanda bukti pemilikan harta benda
2. Jika benda yang di wakafkan berupa benda yang tidak bergerak, maka harus disertai dengan surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh

⁶⁴ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta : Gema Insani, 2003). 124

⁶⁵ Hasbi ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978). 179

⁶⁶ Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1995,). 124

Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak dimaksud

3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁶⁷

Sedangkan akta ikrar wakaf sendiri dibuat rangkap masing-masing untuk:

- a. PPAIW
- b. Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Subdit Agraria setempat
- c. Pengadilan Agama yang mewilayahinya

Selain dibuat rangkap empat untuk disampaikan kepada:

- 1) Wakif
- 2) Nazhir
- 3) Kandepag. Kabupaten/Kota madya
- 4) Kepala Desa yang bersangkutan.⁶⁸

C. *Nazhir*

Nazhir adalah orang atau badan yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.

1. **Ketentuan Nazhir**

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi nazhir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan nazhir sebagaimana tercantum pada pasal 9-14 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi:

Pasal 9 Nazhir meliputi:

- 1) Perorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan hukum

Pasal 10

- a) Perorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - (1) Warga Negara Indonesia
 - (2) Beragama Islam
 - (3) Dewasa

⁶⁷ Pasal 9 PP No. 28 Tahun 1977

⁶⁸ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978

(4) Sehat jasmani dan rohani

(5) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶⁹

Sedangkan pada KHI pasal 215 ayat 4 syarat nazhir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nazhir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang di wakafkan.

- b) Organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- (1) Pengurus organisasi yang badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam
- c) Badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- (1) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.

2. Kewajiban dan Hak-Hak Nazhir Atas Benda Wakaf

Nazhir sebagai pihak yang bertugas memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Meskipun demikian, tidak berarti nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif.⁷⁰

Kewajiban dan hak-hak nazhir diatur dalam pasal 220 KHI jo pasal 7 PP No. 28 Tahun 1977 sebagai berikut:

- 1) *Nazhir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) *Nazhir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagai mana dimaksudkan dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis ‘Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Pada pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28 Tahun 1977 dinyatakan: “nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya

⁶⁹ Terhalangnya melakukan perbuatan hukum bagi seorang nazhir sama halnya dengan wakif. Jadi dalam hal ini seorang nazhir harus memenuhi syarat selain berakal sehat dan juga harus memiliki kecakapan yakni rasyid.

⁷⁰ Said Agil, h. 157

ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis ‘Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat”.

Kemudian yang berhak menentukan *nazhir* wakaf adalah wakif. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nazhir*, mungkin pula diserahkan kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi. Namun agar perwakafan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk menentukan nazhirnya yakni melalui persetujuan PPAIW.⁷¹

3. Pemberhentian Nazhir

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, pada bab V Pasal 45 ayat 1 di jelaskan bahwa, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir atau pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia.

D. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan proses penggandaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian ilmiah.⁷² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan dengan cara peneliti terjun ke lokasi penelitian di Kelurahan Lamaru Balikpapan Timur.

⁷¹ Muhammad Daud Ali, h. 93

⁷²Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 74.

2. Kuesioner, komunikasi secara tidak langsung yang berupa angket,⁷³ daftar pertanyaan yang diisi berupa laporan tentang diri sendiri, setidaknya berdasarkan pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara.
3. Wawancara, yakni tanya jawab antara peneliti dengan Masyarakat di Kelurahan Lamaru, RT 17, Kecamatan Balikpapan Timur.

E. Pembahasan

Berdasarkan penelitian dan temuan data yang peneliti telah paparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam menyikapi permasalahan ini persepsimasyarakat Lamaru terbagi menjadi 2 kelompok:

Pertama, kelompok yang kontra terhadap pengambilalihan amanah nazhir wakaf ini mereka memiliki pemahaman yang sangat bagus terhadap permasalahan agama dan mereka sangat bersemangat untuk mempelajari ilmu agama seperti apa yang dilakukan oleh bapak WY di mushalla tersebut, sehingga mereka tidak mengikuti suatu ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pengambilalihan amanah nazhir dalam permasalahan ini adalah sebuah tindakan yang melanggar peraturan Islam maupun perundang-undangan Republik Indonesia, karena nazhir yang pertama tidak memiliki kesalahan yang menguatkan perbuatan mereka sehingga dapat mengambilalih dalam hal mengurus Mushalla tersebut. Dalam kepengurusan mereka Mushalla tersebut tidak terurus, tidak ada yang mengerjakan shalat di dalamnya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifat Islami sehingga tanah wakaf tersebut berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Karena kita ketahui bersama bahwa wakaf itu suatu benda atau barang yang sifatnya kekal dan dipergunakan untuk kepentingan umum, sehingga wakaf tersebut menjadi sedekah jariah bagi si *wakif* yang telah mewakafkan tanah tersebut, namun dalam kepengurusan mereka ini menyalahi hal tersebut.

Kedua, kelompok yang pro dengan permasalahan ini rata-rata diantara mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap agama atau mereka memahami agama tapi karena kesombongan yang ada dalam diri mereka untuk tidak mengikuti suatu

⁷³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press 2014), 88.

ajaran yang bertentangan dengan kebiasaan mereka walaupun itu suatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-nya.

Kepengurusan nazhir pertama dalam mengelolah tanah wakaf yang di bangun Mushalla tersebut sekelompok masyarakat Lamaru melihat ini tidak menguntungkan bagi mereka, bisa-bisa ini mengancam budaya mereka yang sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang yang mereka ikuti dengan konsisten tanpa mengetahui dalil-dalil yang mendasarinya. Sehingga mereka mengambilalih amanah nazhir pertama dengan berdasarkan hal tersebut karena merasa bahwa ketika kita tidak mengambilalih dalam kepengurusan Mushalla ini bisa menjadi sebuah hambatan bagi kita dalam melakukan kebiasaan.

Untuk dapat mengambilalih dalam kepengurusan Mushalla mereka menyebarkan fitnah dan menghasut masyarakat bahwa bapak WY itu adalah orang yang sesat dan apa yang dia ajarkan itu salah, namun lewat jalur ini mereka tidak dapat mengambilalih kepengurusan tersebut sehingga mereka mengambilalihnya dengan jalan memaksa, dengan alasan mempertahankan kebiasaan sehingga jika ada kebenaran yang bertentangan dengan kebiasaan mereka akan susah untuk diterima. Dalam hal ini mereka merasa bahwa apa yang di lakukan itu adalah jalan yang paling benar untuk mempertahankan kebiasaan, sebelum bapak WY lebih jauh dalam menyampaikan ajaran kepada masyarakat.

Dalam mengelola tanah wakaf bapak WY mengelolanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, bapak WY masih melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, Rasul-Nya dan pemerintah dalam hal menjalankan amanahnya sebagai nazhir, karena dalam hukum Islam mereka yang tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hal menjalankan amanah mereka itulah yang khianat dari amanah. Allah swt berfirman dalam surah an-Nisa ayat 59:

Jadi tidak ada alasan yang kuat bagi mereka untuk mengambilalih amanah nazhir tersebut dari bapak WY, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang besar, mereka mengambil hak bapak WY secara zalim, kenapa dikatakan demikian karena bapak WY masih menunaikan amanahnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Rasulullah saw bersabda:

□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□
 □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□
 □□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□
 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□
 □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□
 □□□□□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□

“Sa’id bin Zaid ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: barangsiapa yang mengambil tanah dengan cara zalim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.”⁷⁴

Mereka mengambilalih amanah nazhir karena bertentangan dengan kebiasaan mereka, inilah yang mendasari mereka mengambilalih dalam mengelola mushalla tersebut. Dalam kepengurusan mereka setelah diambil mereka tidak memenuhi tujuan wakaf tersebut. Sehingga masyarakat umum tidak mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut, karena mereka tidak mengetahui apa tujuan wakaf itu, ini menunjukkan bahwa mereka mengambilalih amanah nazhir karena bertentangan dengan kebiasaan mereka saja bukan faktor kesalahan atau terdapat cacat pada nazhir pertama.

Wakaf adalah suatu amalan yang mengalir terus pahalanya walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia, itu didapatkan ketika wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Inilah yang dilakukan bapak WY yang menginspirasi untuk membangun mushalla sehingga orang mengerjakan shalat di dalamnya, pengajian tentang Islam, dan belajar Iqro’/al-Qur’an. Dia melakukan itu semua untuk menunaikan amanahnya sebagai orang di percaya yang dapat merealisasikan itu semua. Sehingga bapak WY memiliki hak dan kewajiban terhadap tanah wakaf tersebut, inilah yang menyebabkan mereka yang mengambilalih dalam mengelola mushalla tersebut dikatakan mengambil hak orang lain secara zalim. Allah swt berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42-43:

D. Kesimpulan

Dari analisa yang peneliti uraikan maka peneliti dapat simpulkan

⁷⁴ Imam Muslim Ibnu al-Hajj, *Shahih Muslim, Jilid III* (Beirut Lebanon : Dar al-Kitab al-‘A>lamiyah, n.d), h. 1230

bahwapersepsi masyarakat Lamaru terbagi menjadi dua kelompok ada yang kontra dan ada yang pro.

1. Adapun yang kontra dengan permasalahan ini mereka mengatakan bahwa pengambilalihan amanah nazhir wakaf oleh sekelompok orang, ini adalah merupakan perbuatan yang melanggar syari'at maupun perundang-undangan negara. Dengan alasan bahwa dalam mengelola tanah wakaf bapak WY mengelolanya dengan baik, dan tidak melakukan kesalahan yang itu menyebabkan amanahnya sebagai nazhir bisa diambilalih, dan masyarakat umum menikmati manfaat dari tanah wakaf tersebut atas keberhasilan bapak WY dalam mengelolanya.
2. Adapun yang pro dengan permasalahan ini mereka mengatakan bahwasannya pengambilalihan amanah nazhir ini adalah suatu tindakan yang bijaksana untuk mempertahankan kebiasaan mereka. Dengan alasan bahwa mereka melihat bapak WY dalam mengelola tanah wakaf tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena apa yang diajarkan olehnya bertentangan dengan kebiasaan mereka, itulah yang membuat mereka untuk menolak dengan cara apa pun jika ada orang yang membawa suatu ajaran yang bertentangan dengan kebiasaan mereka.

Berdasarkan pemahaman yang berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, maka dalam pengambilalihan amanah nazhir di Kelurahan Lamaru RT. 17, adalah sebuah kesalahan yang besar yang semestinya mereka harus merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah yang dibarengi dengan penjelasan para ulama atau orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu perwakafan dalam Islam. Mereka juga salah dalam memahami kaidah ushul fiqh, sebagai mana yang disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, dengan judul *Taudhihul Ahkam min Bulughul Maram*, pada pembahasan *Ta'rif Qawa'id al-Fiqhiyyah* (pengertian kaidah-kaidah fikih) yaitu, *al-'A>datu Muhakamh* (kebiasaan dapat menjadi hukum), maksudnya bukan semua kebiasaan dapat menjadi hukum akan tetapi kebiasaan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan landasan hukum syari'at Islam yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'arabi, 1958.

- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988.
- al-Hajj, Imam Muslim Ibnu. *Shahih Muslim, Jilid III*, Beirut Lebanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, n.d.
- al-Hajj, Imam Muslim Ibnu. *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut Lebanon: Dar al-Kitab ‘Alamiyah, n.d.
- Anam, FaishalHaqdanSaiful, *HukumWakafdanPerwakafandiIndonesia*, Pasuruan Jawa Timur :GBI(AnggotaIKADI),1994.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh, Jilid 3*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Indonesia* Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Depak, RI. *Fikih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji, *Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1075 Serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: n.p, 2004.
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Edisi Lengkap Undang-Undang RI Nomor I Tahun 1974 Tentang Perwakafan, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Gunawan, Agus. *Praktek Sertifikat Wakaf*. Balikpapan: Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatullah Balikpapan, 2009.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad, Abu Bakar. *Subulus Salam, Juz III*, Surabaya: Al- Ikhlas.
- Nazhir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2014.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.